

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMANENAN
TEGAKAN DI HUTAN RAKYAT
(STUDI KASUS DI KELURAHAN SELOPURO, KECAMATAN
BATUWARNO, KABUPATEN WONOGIRI,
PROVINSI JAWA TENGAH)**

K.R. Pramesthi, Haryanto
Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta

Abstract

The growth of forest society plays important role to support rehabilitation and conservation of degraded lands. The problem that found is less implemented silvicultur rules when harvesting time because the land that owned is narrow and status of land ownership is in each individual. This aims of this research is to find out the factors that influence harvesting of stand in Selopuro forest society that has LEI certificate. The result showed if factors that influence harvesting of stand in Selopuro forest society are technical, social and economic factor. Technical factors consist of time of harvest, type of tree, purpose of tree felling and diameter of tree. Social factors consist of status and involvement of farmers in KPS, the role of traders and decision-making of farmer. Economic factors consist of the fulfillment of basic needs and the needs of a sudden

Key word : harvesting of stand, forest society.

Pendahuluan

Latar belakang

Jumlah penduduk di Indonesia semakin meningkat sehingga meningkatkan penyediaan kebutuhan. Konsekuensi ini terhadap lahan, lahan kerja dan penerimaan. Kebutuhan yang sebelumnya bersifat tersier dapat berubah menjadi primer. Kesenjangan yang terjadi di masyarakat akan berpotensi menimbulkan kecemburuan sosial.

Masyarakat pedesaan umumnya memiliki rasa kebersamaan dan hubungan yang tercipta terasa lebih erat dibanding masyarakat pada umumnya, hal ini akan berpengaruh besar terhadap kebutuhan ataupun kepemilikan barang. Masyarakat pedesaan banyak bekerja di bidang pertanian, pada wilayah tertentu mengandalkan bidang kehutanan.

Pengelolaan hutan rakyat oleh masyarakat lebih banyak bertujuan untuk tabungan ataupun persediaan yang bisa digunakan sewaktu-waktu untuk memenuhi kebutuhan. Jenis tegakan atau tanaman yang ada pada lahan ini sangat beragam dan tidak hanya berupa tanaman kehutanan saja, melainkan campuran antara tanaman kehutanan dan tanaman pertanian. Pencampuran tanaman ini, akan menyebabkan perbedaan mengenai cara penanaman, pemeliharaan, waktu

pemanenan serta tingkat kebutuhan pemanenan antara jenis tanaman satu dengan tanaman lain.

Kabupaten Wonogiri memiliki hutan rakyat seluas 15.320 ha, 788,96 ha diantaranya sudah diketahui potensinya. Desa Selopuro menjadi salah satu pelopor terbentuknya hutan rakyat, dimana terdapat 262,77 ha yang telah diketahui potensinya dan didominasi oleh tegakan jati (Persepsi, 2004). Hutan rakyat di Kecamatan Batuwarno, Kabupaten Wonogiri merupakan salah satu kawasan hutan rakyat yang telah berhasil memperoleh sertifikasi dari Lembaga Ecolabeling Indonesia (LEI).

Salah satu hal yang penting dalam menentukan stabilitas, bahkan peningkatan sumberdaya lahan hutan rakyat adalah pemanenan. Wackerman (1949) yang dikutip dari Maryudi (2001), kegiatan pemanfaatan hutan atau teknik pemanenan hasil hutan merupakan salah satu kegiatan terpenting dalam pengelolaan hutan. Pemanenan yang tidak memenuhi persyaratan pemanenan akan menurunkan sumber daya lahan karena akibat-akibat yang ditimbulkan.

Maryudi (2001) telah melakukan penelitian teknik pemanenan hasil hutan pada hutan rakyat di kecamatan Sapuran dan Kepil Wonosobo dan Trihatmoko (2007) di kecamatan Batuwarno Wonogiri menyimpulkan bahwa teknik pemanenan di

kedua lokasi penelitian mempunyai pola yang sama. Pemanenan hasil hutan rakyat dilakukan secara semi-mekanis. Permasalahan yang belum diungkapkan adalah apa yang mendorong pengelola hutan rakyat melakukan teknik pemanenan semacam itu dan adakah faktor di luar teknik yang mempengaruhi teknik pemanenan.

Berdasarkan tersebut di atas maka faktor-faktor yang berpengaruh pada pemanenan perlu dikaji lebih lanjut untuk mengetahui kekurangan-kekurangan dan masalah yang ada, sehingga nantinya dapat digunakan sebagai masukan pengetahuan pada masyarakat untuk lebih meningkatkan pengelolaan agar dapat memberikan hasil, pemenuhan kebutuhan dan mempertahankan sumber daya lahan yang ada.

Rumusan masalah

Tindakan melakukan pemanenan pada hutan rakyat merupakan akumulasi berbagai faktor yang terjadi di dalam pribadi pengelola. Faktor-faktor tersebut dapat berupa faktor teknis, sosial dan ekonomi. Atas dasar hal tersebut maka permasalahan yang perlu dikemukakan adalah faktor-faktor apa yang berpengaruh terhadap pemanenan tegakan yang ada di hutan rakyat.

Tujuan dan manfaat penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pemanenan tegakan baik dari teknis, sosial, dan ekonomi pada hutan rakyat di Kelurahan Selopuro Kecamatan Batuwarno Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain dasar perencanaan dan pembinaan dalam mengelola hutan rakyat serta menjadi teladan bagi masyarakat sekitarnya mengenai pentingnya mengelola hutan.

Metode

Bahan dan alat

Bahan dan alat yang digunakan dalam penelitian ini antara lain lahan hutan rakyat, daftar pertanyaan (*questionary*), pita meter pengukur diameter pohon (*phiband*), alat pengukur tinggi pohon (*haga meter*), clinometer, hand counter, kompas, alat tulis dan alat hitung.

Teknik pengumpulan data

Data yang dikumpulkan dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung di lapangan melalui pencatatan, pengamatan dan observasi lapangan, pengukuran, serta wawancara dengan responden. Responden adalah petani sekaligus pengelola hutan rakyat. Jumlah responden sebanyak 30 orang, tersebar dalam 4 (empat) KPS atau 50% dari 8 (delapan) KPS yang ada di Selopuro.

Data sekunder diperoleh dari kantor atau instansi terkait, yaitu data dari kantor kelurahan atau desa tempat penelitian, kelompok-kelompok tani hutan / FKPS, kantor kecamatan, kantor Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Pertambangan (LKHP), kantor Badan Pusat Statistik (BPS) dan kantor PERSEPSI Wonogiri.

Analisis data

Hasil wawancara dan pengukuran tegakan ditabulasi dan dianalisis secara deskriptif. Hasil pengamatan digunakan untuk menambah pembahasan dalam meningkatkan pemahaman terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi pemanenan.

Keadaan Umum Daerah Penelitian

Keadaan administrasi pemerintahan

Kelurahan Selopuro terletak di sebelah tenggara ibukota Kabupaten Wonogiri, berjarak ± 55 km. Secara administratif termasuk kecamatan Batuwarno. Kelurahan Selopuro terbagi menjadi 8 (delapan) lingkungan, yaitu Pagersengon, Jarak, Sudan, Selorejo, Sidowayah, Watugeni, Pendhem, dan Tulakan.

Keadaan sumberdaya wilayah

Luas wilayah 707,9060 ha, tinggi tempat 292 m di atas permukaan air laut. Topografi wilayah berbukit sampai bergunung. Permukaan tanah berwarna kuning keputihan, coklat kemerahan, dan kelabu, serta mempunyai lapisan tanah yang dangkal, berkerikil, sampai berbatu dan berkapur.

Lembah bagian selatan dibangun Dam, menampung aliran air dari wilayah Pagersengon, Jarak, Sudan, Pendhem, dan Tulakan, sedangkan lembah bagian utara membentuk embung, menampung aliran air

dari wilayah Selorejo, Watugeni dan Sidowayah.

Curah hujan 5 (lima) tahun terakhir rata-rata 2000,3 mm/th tersebar dalam 75 hari hujan (Anonim, 2008). Penggunaan lahan untuk sawah 69,9290 ha, lahan kering 382 ha, hutan negara 240 ha, dan fasilitas umum 6 ha.

Pola tanam yang dilakukan petani/masyarakat pada musim hujan (MH) di lahan sawah adalah jagung dan pada musim kemarau (MK) adalah padi. Lahan tegalan ditanami padi gogo/jagung kemudian kacang tanah serta kayu. Lahan pekarangan ditanami buah-buahan terutama mangga, tanaman empon-empon, dan kayu.

Penduduk Kelurahan Selopuro sejumlah 1819 jiwa yang terdiri dari laki-laki sebanyak 909 orang dan perempuan sebanyak 910 orang. Berdasarkan sebaran umur, paling banyak berusia 26-55 tahun dan paling sedikit berusia < 6 tahun.

Sejarah tumbuh-kembang Hutan Rakyat (HR) Selopuro

Tumbuh kembang hutan rakyat di Selopuro dilatar-belakangi keprihatinan terhadap lahan kritis berbatu dan kemiskinan. Kesulitan mendapatkan air, udara panas, rawan pangan di MK, dan banjir serta tanah longsor di MH, gizi buruk, kebutuhan hidup pokok tidak tercukupi, tidak mampu menyekolahkan anak, dan tempat tinggal yang tidak memadai merupakan contoh.

Perkembangan pengelolaan hutan rakyat dibagi dalam 4 (empat) tahapan yaitu perintisan (1967-1984), penataan (1985-1998), pengembangan (1999-2002) dan penguatan kemampuan dan pengakuan (2003 sampai sekarang) (Persepsi, 2004).

Hasil Dan Pembahasan

Karakteristik responden

Petani hutan rakyat sebanyak 53,33% berumur 54-61 tahun, 36,67% berumur 46-53 tahun, sedangkan sisanya < 45 dan > 61 tahun. Jenjang pendidikan 56,67% tamat SD/SR, 23,33% tamat SLTP dan sisanya tamat SLTA.

Kepemilikan lahan tegal yang diusahakan untuk hutan rakyat sebanyak 36,66% rata-rata seluas 2500-5000 m², 33,33% seluas 5100-10.000 m² dan sisanya < 2500 serta > 10.000 m². Kepemilikan lahan pekarangan 76,66%

rata-rata seluas 2500-5000 m², 10% seluas < 2500 m² dan 3,34% seluas 5100-7500 m².

Jumlah tanggungan keluarga menjadi salah satu faktor yang akan mempengaruhi banyaknya kebutuhan yang diperlukan. Sebanyak 50% petani hutan rakyat mempunyai tanggungan sebanyak 4-5 orang, 46,67% sebanyak 2-3 orang dan 3,33% sebanyak < 2 orang.

Model dan pengelolaan hutan rakyat Selopuro

Secara umum terdapat 3 (tiga) model hutan rakyat yang dikembangkan di wilayah Selopuro, yaitu hutan rakyat pola tumpangsari, pola pekarangan, dan pola khusus. Hutan rakyat pola tumpangsari mengkombinasikan kayu dengan tanaman pangan dan buah. Tanaman kayu yang ada biasanya ditanam di sisi tepi batas kepemilikan sekaligus berfungsi sebagai pagar di lahan hutan tersebut. Jenis kayu yang ditanam seperti lamtoro, mahoni dan jati.

Pola yang sering diterapkan dalam pengelolaan hutan rakyat adalah pola pertanaman ganda (*multiple cropping*). Pola pertanaman ini sudah dilaksanakan di Indonesia sejak tahun 1900 (Dalrymple, 1977 dalam Awang, 2002).

Jenis kayu yang dibudidayakan berupa jati (100%), mahoni (86,65%), akasia (43%), johar (13,3%), sonokeling (3,33%), weru (10%), sengon (36,67) dan trembesi (23,33%). Bawah tegakan dibudidayakan tanaman empon-empon seperti kunir dan jahe, serta tanaman pangan seperti uwi, gembili, suweg, dan tales.

Simon (1995) menyatakan bahwa jenis pohon yang digunakan dalam pembangunan hutan rakyat umumnya memenuhi kriteria yang menyangkut 3 (tiga) aspek, yaitu :

1. Sesuai dengan keadaan iklim, jenis tanah, dan kesuburan serta fisik wilayah (*environmentally friendly*).
2. Cepat menghasilkan dan dapat dibudidayakan oleh masyarakat dengan mudah (*social acceptable*).
3. Menghasilkan komoditas yang mudah dipasarkan dan memenuhi bahan baku industri (*economically profitable*).

Pengelolaan hutan rakyat baik tanaman kayu sebagai tanaman pokok maupun tanaman di bawah tegakan dilakukan secara sederhana oleh individu pemilik. Pengelolaan hutan pada

umumnya dilakukan secara turun temurun dengan waktu pengelolaan berdasarkan ketersediaan waktu setelah kegiatan yang lain seperti merumput, usaha tani dan kegiatan sampingan selesai dilakukan.

Faktor teknis yang mempengaruhi pemanenan

Pemanenan kayu dilakukan berdasarkan tebang pilih dan tebang butuh. Selain kebutuhan mendesak, musim penghujan menjadi factor lain. Pemanenan pada musim penghujan dapat diperoleh volume kayu yang optimal dalam umur yang sama dibanding pada musim kemarau (Tabel 1). Selain itu, kayu yang ditebang pada musim penghujan mempunyai kualitas lebih baik karena tidak mudah terserang hama bubuk.

Tabel 1. Musim pemanenan kayu

No	Waktu Tebang	Jumlah	Prosentase
1	Musim Hujan	24	80
2	Musim	3	10
3	Kemarau Sepanjang Waktu	3	10

Sumber data : Analisis data primer

Subarudin (2005) yang dikutip dalam Senoaji (2007), sistem tebang butuh merupakan sistem pelaksanaan penebangan pohon di lahan masyarakat yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Tabel 2. Jenis kayu yang didahulukan ditebang

No	Jenis	Jumlah	Persentase
1	Jati	9	30,00
2	Mahoni	13	43,33
3	Akasia	18	60,00
4	Johar	28	93,33
5	Sonokeling	14	46,66
6	Weru	25	83,33
7	Sengon	20	66,67
8	Trembesi	23	76,67

Sumber data : Analisa data primer

Jenis tanaman yang didahulukan ditebang adalah jenis non jati dan mahoni (Tabel 2). Hal

ini dikarenakan jati mempunyai nilai dan harga paling tinggi diantara semua tanaman penyusun yang ada sehingga dapat bersifat tabungan.

Jenis kayu yang paling banyak dipanen adalah johar, diikuti weru, trembesi, sengon, akasia, sonokeling, mahoni dan terakhir jati. Johar dimanfaatkan daunnya untuk pupuk hijau. Trembesi juga didahulukan ditebang karena sifat tajuknya memerlukan ruang yang lebar sehingga mengurangi produktivitas lahan.

Pengetahuan lokal untuk menentukan penebangan dilihat dari tinggi, besar, kelurusan, ukuran dan manfaat (Tabel 3). Tinggi dan lingkaran batang merupakan factor yang menjadi pertimbangan utama.

Tabel 3. Ciri-ciri pohon yang lebih banyak ditebang

No	Unsur	Ciri-ciri
1	Tinggi	Pertumbuhannya tertekan oleh pohon yang lain
2	Besar	Telah mencapai ukuran maksimum/terhenti
3	Kelurusan	Kurang/bengkok/banyak mata tunas
4	Ukuran	< 20 cm
5	Manfaat	Kurang dimanfaatkan untuk bahan bangunan

Sumber data : Analisis data primer

Ukuran pohon yang umum ditebang apabila diameternya mencapai 10 – 40 cm. Meskipun demikian 56,67% petani akan menebang apabila ukuran mencapai 30 - 40 cm (Tabel 4).

Tabel 4. Ukuran pohon yang ditebang

No	Diameter	Jumlah	Persentase
1	< 10 cm	0	0
2	10 – 20 cm	3	10,00
3	20 – 30 cm	7	23,33
4	30 – 40 cm	17	56,67
5	> 40 cm	1	3,33

Sumber data : Analisis data primer



Gambar 1. Diameter pohon yang ditebang

Senoaji (2007) menyebut rata-rata daur yang dipakai oleh masyarakat adalah 15 tahun, bahkan ada yang menebang sebelum tanaman berumur 10 tahun. Biasanya kayu dijual dengan harga murah per pohonnya, sisanya berupa ranting dan cabang-cabang kecil digunakan untuk kayu bakar.

Sebelum penebangan dilakukan, tindakan yang dilakukan terhadap pohon bermacam-macam. Perlakuan dimaksud ada yang diteres, tidak diteres atau cukup dipangkas cabang dan ranting kemudian ditebang (Tabel 5).

Tabel 5. Perlakuan sebelum tebang

No	Perlakuan	Jumlah	Presentase
1	Diteres	13	43,44
2	Tidak diteres	11	36,67
3	Lain-lain	6	19,89
	Jumlah	30	100

Sumber data : Analisis data primer

Perlakuan peneresan dilakukan terhadap kayu yang akan digunakan untuk keperluan sendiri. Kayu yang tidak diteres dilakukan terhadap kayu yang dibeli pedagang. Sortimen dimanfaatkan petani untuk kayu bakar, selain itu agar disaat kayu ditebang tidak mengganggu pohon-pohon di sekitar dan penebangan berlangsung dengan cepat.

Ketika melakukan penebangan, peralatan yang banyak digunakan adalah gergaji mesin (*chain saw*) dan tali, namun masih ada juga yang menggunakan gergaji tangan atau kapak

(Tabel 5). Penanganan lepas tergantung status kepemilikan dan keadaan lahan/medan dan banyak kayu yang ditebang. Apabila lahan milik dan medan berat maka kayu langsung diolah ditempat, sedangkan apabila pemilik kayu pedagang kayu dipotong sesuai dengan ukuran standar.

Tabel 6. Peralatan tebang

No	Jenis Alat	Jumlah	Presentase
1	Gergaji Mesin	15	50,00
2	(<i>chain saw</i>)	6	20,00
3	Gergaji	9	30,00
4	Tangan Kapak Lain-lain (tali, parang)	30	100

Sumber data : Analisis data primer

Faktor sosial yang mempengaruhi pemanenan

Keterlibatan petani dalam KPS, langsung atau tidak langsung mempunyai peran terhadap tindakan yang akan dilakukan. Petani yang terlibat secara mantap lebih banyak mempertimbangkan kapan pemanenan dilakukan.

Rutinitas pertemuan dalam KPS menambah pemahaman petani, namun masih dijumpai petani yang kurang faham. Sifat individu mengakibatkan pemahaman terhadap ruang lingkup materi pemanenan menjadi berbeda (Tabel 7).

Tabel 7. Keterlibatan petani dalam KPS

No	Keterlibatan	Jumlah	Presentase
1	Terlibat, mantap	17	56,67
2	Terlibat, tidak mantap	13	43,33
3	Tidak terlibat	0	0

Sumber data : Analisis data primer

Tabel 8. Pemahaman petani terhadap materi pemanenan

No	Tingkat pemahaman	Jumlah	Presentase
1	Faham	15	50,00
2	Kurang faham	11	36,67
3	Tidak faham	4	13,33

Sumber data : Analisis data primer

Keberadaan pembeli kayu di sekitar pemukiman mempunyai peran dalam mendorong cepat atau lambatnya melakukan pemanenan (Tabel 9).

Tabel 9. Peran pedagang kayu terhadap pemanenan

No	Tingkat peran	Jumlah	Presentase
1	Sangat berperan	3	10,00
2	berperan	19	63,33
3	Kurang berperan	8	26,67
	Tidak berperan		

Sumber data : Analisis data primer

Peran pedagang kayu mendorong petani mempercepat penebangan kayu yang dimiliki walaupun menurut petani belum waktunya. Penyebabnya antara lain rasa sungkan dan kesetiakawanan yang tinggi. Ada juga petani yang tidak terpengaruh oleh pedagang kayu karena pohon yang dimiliki tersebut belum waktunya ditebang dan atau apabila harga masih rendah.

Kenyataan yang dikemukakan di atas didukung oleh kenyataan bahwa pengambilan keputusan memanen tidaknya terhadap kayu yang dimiliki sepenuhnya dilakukan petani. Keputusan ini diambil sebagian besar petani atas dasar musyawarah keluarga (Tabel 9).

Keadaan sosial yang lain seperti membuat rumah baru bagi anak petani yang telah berkeluarga, memperbaiki rumah, menyelenggarakan hajatan biasanya

mendorong petani untuk melakukan pemanenan.

Tabel 10. Pengambilan keputusan dalam melakukan pemanenan

No	Pengambil Keputusan	Jumlah	Presentase
1	Petani sendiri	9	30,00
2	Petani dan keluarganya	14	46,67
3	Lain-lain (KPS, Pedagang dll)	7	23,33

Sumber data : Analisis data primer

Faktor ekonomi yang mempengaruhi pemanenan

Pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari, 80% mengandalkan bertani di antara tegakan, sawah dan sempadan bendung, 16,67% dari buruh dan 3,3% dari hutang. Untuk kebutuhan berkala dipenuhi dari menjual ternak, merantau, dan pemanenan kayu (Tabel 11).

Tabel 11. Pemenuhan kebutuhan berkala

No	Asal	Jumlah	Presentase
1	Merantau	11	36,67
2	Ternak	16	53,33
3	Pemanenan Kayu	3	10,00

Sumber data : Analisis data primer

Maryudi (2001) menyatakan pola pemanenan yang diterapkan oleh petani hutan rakyat pada umumnya adalah tebang butuh. PERSEPSI (2004) melaporkan besarnya kebutuhan mendesak dan dalam jumlah banyak yang memaksa petani melakukan penebangan kayu antara Rp 2.000.000–Rp 3.000.000. Trihatmoko (2007) melaporkan bahwa biaya pemanenan hasil hutan secara keseluruhan antara Rp. 60.050,30 – Rp. 85.566,31 setiap m³.

Tabel 12. Jenis kebutuhan berkala

No	Kebutuhan berkala	Jumlah	Presentase
1	Kesehatan	6	20,00
2	Hajatan	9	30,00
3	Sekolah	7	23,33
4	Ternak	5	16,67
5	Perabot Rumah	3	10,00

Sumber data : Analisis data primer

Jenis kebutuhan berkala yang mendorong kuat untuk melakukan pemanenan kayu hutan rakyat adalah kebutuhan hajat (Tabel 12). Kebutuhan kesehatan, sekolah dan pengadaan ternak serta perabot rumah tangga berturut-turut yang dipenuhi petani.

Penetapan harga tergantung penawaran dan permintaan antara petani dan pedagang kayu. Harga kayu yang diperoleh petani hutan rakyat Selopuro lebih banyak tergantung pedagang (Tabel 13). Penetapan harga oleh pedagang umumnya terjadi pada petani yang kurang menguasai harga atau kedekatan hubungan antara petani dengan pedagang. Penetapan harga oleh petani karena kemampuan dalam ekonomi dan kualitas kayu yang lebih baik serta penguasaan harga pasar. Musyawarah terjadi apabila keduanya mempunyai kepentingan terhadap kayu yang akan dipanen.

Tabel 13. Penetapan harga kayu

No	Sumber	Jumlah	Presentase
1	Pedagang	12	40,00
2	Petani	10	33,33
3	Pedagang dan petani	8	26,67

Sumber data : Analisis data primer

Perlu dikemukakan bahwa sebelum melakukan pemanenan petani pada umumnya mencari informasi tentang perkembangan harga kayu. Informasi diperoleh dari aktor petani yang pernah menjual kayu maupun pengurus KPS.

Simpulan Dan Saran

Kesimpulan

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pemanenan tegakan hutan rakyat terdiri faktor teknis, sosial, dan ekonomi. Masing-masing faktor sebagai berikut :

1. Faktor teknis meliputi waktu panen dilakukan pada musim penghujan (80%), jenis pohon non jati dan mahoni lebih banyak ditebang, pohon yang tidak mempunyai harapan didahulukan ditebang, pohon siap dipanen apabila diameter mencapai 30–40 cm.
2. Faktor sosial meliputi keterlibatan petani dalam KPS, status mantap (56,67%), pedagang kayu kurang berperan (63,33%),

pengambilan keputusan dilakukan petani dan keluarganya (46,67%).

3. Faktor ekonomi meliputi kebutuhan pokok sudah tidak dapat terpenuhi, adanya kebutuhan mendadak tidak tercukupi dari menjual ternak (53,33%) atau merantau (36,67%) maka penebangan akan dilakukan.

Saran

Saran yang dapat dikemukakan dalam menentukan pemanenan yaitu :

1. Peningkatan tindakan silvikultur yang bertujuan untuk memperoleh pemanenan kayu secara periodik. Secara teknik tindakan pemanenan yang sebaiknya dilakukan antara lain telah memenuhi ukuran kayu secara optimum dan dilakukan pada musim penghujan.
2. Secara sosial dan ekonomi diperlukan peningkatan usaha sampingan yang telah ada agar lebih produktif serta pembentukan usaha bersama petani untuk menopang kebutuhan berkala.

Ucapan Terima Kasih

Artikel ini disusun untuk mengenang bapak Ir. Haryanto, MS. yang telah berpulang ke rahmatulloh, semoga segala amal kebajikan yang diberikan kepada penulis senantiasa melapangkan perjalanan arwahnyanya.

Daftar Pustaka

- Al Rasjid. 1979. *Pemilihan Jenis Tanaman Penghijauan Untuk Pembangunan Hutan Rakyat dalam Loka Karya Pemilihan Jenis Tanaman Reboisasi Penghijauan Hutan Alam dan Hutan Rakyat*. Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.
- Awang, dkk. 2002. *Hutan Rakyat: Sosial Ekonomi dan Pemasaran*. BPFE. Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.
- Maryudi, A. 2001. *Analisis Produktivitas dan Biaya Pemanenan Hasil Hutan pada Pengusahaan Hutan Skala Kecil yang Diusahakan oleh Masyarakat*. Laporan Penelitian. Fakultas

- Kehutanan Universitas Gadjah Mada.
Yogyakarta.
- Persepsi. 2004. *Sertifikasi Hutan Rakyat (Pengalaman Lapangan Hutan Jati Jawa)*. Makalah dalam Sarasehan dan Kongres LEI. Jakarta.
- Senoaji, A. E. 2007. Peranan Tebang Butuh di Hutan Rakyat dan Dampaknya Terhadap Kelestarian (Studi Kasus di Desa Karangasem, Kecamatan Paliyan, Kabupaten Gunung Kidul, Propinsi DIY). *Skripsi*. Tidak Dipublikasikan.
- Simon, H. 1995. *Pokok-pokok Pikiran Tinjauan Tentang Hutan Ekonomi Pembangunan Hutan Rakyat*. Dalam Proceeding Seminar Pengembangan Hutan Rakyat di Bangkuang Riau.
- Trihatmoko, J. 2007. Prestasi Kerja dan Teknik Pemanenan Hasil Hutan pada Pengelolaan Hutan Rakyat (Studi Kasus di Hutan Rakyat Tersertifikasi, Kecamatan Batuwarno, Kabupaten Wonogiri, Propinsi Jawa Tengah). *Skripsi*. Tidak Dipublikasikan.